

ARSIP SEBAGAI PENDUKUNG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN LITERASI BANGSA

ARCHIVES TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN CONTEXT OF DEVELOPING THE NATIONAL LITERACY RATE

Toto Widyarsono

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560
Email: twidyarsono@yahoo.com

Abstract

Cultural heritages have to be preserved and at the same time they need to be used properly in order to seek a new form to maintain their existence in this modern world. It is one of a challenge in the globalization era that needs to be overcome positively. Creative innovation is needed so that these cultural heritages would not be forgotten. The cultural heritages should be in a new form in order to maintain their existence. The combination between tradition and creativity will create new superior things. One of the cultural heritages is archive. Archive consists of a media of recording that contains documented information. Besides that, archive holds a record of the journey of a nation and has valuable contribution to develop the national literacy rate.

Keywords: Archives, Cultural Heritage, National Literacy Rate, Cultural Development

Abstrak

Warisan kebudayaan tidak saja harus dilestarikan tetapi juga harus selalu mencari bentuk baru untuk mempertahankan eksistensinya di tengah pesatnya kemajuan jaman. Ini adalah tantangan globalisasi yang mesti disikapi dengan positif. Inovasi kreatif diperlukan agar kekayaan kultural tak tergerus arus waktu. Warisan kebudayaan harus mencari bentuk baru untuk menampilkan eksistensinya di tengah ruang yang baru. Persinggungan antara tradisi dan kreativitas akan membuahkan hal baru yang unggul dan kaya. Salah satu warisan itu adalah arsip, selain ada bentuk fisik yang merupakan media rekam, arsip juga berarti informasi yang terdokumentasi dalam media tersebut. Selain berisi tentang catatan perjalanan kehidupan bangsa, arsip mempunyai potensi pemberi kontribusi bagi pembangunan literasi bangsa.

Kata Kunci: Arsip, Warisan Budaya, Literasi Bangsa, Pemajuan Kebudayaan

PENDAHULUAN

Setidaknya di Indonesia terdapat lima lembaga yang berlabel nasional terkait dengan pemajuan kebudayaan dan pembangunan literasi bangsa, yaitu Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Museum Nasional, Galeri Nasional dan Lembaga Kantor Berita Nasional. Sekaligus lembaga tersebut mempunyai fungsi yang senada yaitu menunjang pendidikan dan mengemban misi kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) menyebutkan fungsi-fungsi yang diemban lembaga-lembaga tersebut, yaitu: memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan citra bangsa.

Akan halnya arsip mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) mengkonsolidasikan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud ketahanan nasional; 2) menentukan identitas bangsa agar terbaca serta mencari 'kebenaran' masa lampau melalui dokumen yang otentik agar berdaulat, berdikari dan berkepribadian; 3) berperan mencerdaskan bangsa sehingga maju dan mempunyai daya saing; 4) melestarikan warisan budaya bangsa (*national heritage*) sebagai asset menuju kehidupan yang bermutu, makmur dan berkeadaban; 5) melestarikan testimoni lokal, nasional dan warisan dunia (*memory of the world*). Catatan dokumentasi arsip tidak hanya melambungkan komunikasi, tetapi juga berbahasa, beretika, berfilsafat hingga memahami sejarah dan ruang sosial politik masyarakat termasuk literasi bangsa.

Literasi diartikan sebagai kemampuan memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setidaknya terdapat enam literasi dasar yaitu: baca tulis, numeral, digital, finansial, sains dasar dan budaya, serta keragaman.

Manusia harus bergerak, mengeksplorasinya, yang berarti melakukan persiapan, akumulasi semua ini sesungguhnya bukan hanya dipahami sebagai realitas budaya tampak (*tangible*), tetapi juga realitas budaya tak tampak (*intangible*), kemampuan manusia mengelola harta tak kelihatan inilah (kepercayaan, pengetahuan, daya juang, informasi, pembelajaran, etika) masih kurang dialami di persekolahan kita. Semua keterampilan ini perlu dipersiapkan dalam menghadapi kehidupan bernegara di tengah pergaulan dengan masyarakat dunia. Disamping pembangunan ekonomi, pembangunan juga mencakup ide mendewasakan rakyat baik melalui pendidikan juga penyuburan segala bentuk kreasi (Adhitama: 2013).

Arsip sebagai bagian dari identitas bangsa tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan kebudayaan Indonesia, membutuhkan sebuah kebijakan yang mendorong tersedianya dukungan sumber daya dan mekanisme pengelolaannya yang transparan dan akuntabel; mewujudkan program-program edukasi publik serta distribusi pengetahuan dalam skala nasional dan internasional.

Pengalaman kehidupan sehari-hari, kita cukup “*shock*”, bila menyaksikan pemahaman yang tidak mendalam mengenai apa sebenarnya hakekat kebangsaan Indonesia itu. Ujian terhadap rasa kebangsaan tentu saja bisa terlihat dari cara kita merespon berbagai fenomena. Apakah pemuda-pemudi kita hafal 100 persen lagu “Indonesia Raya”, masiakah mereka mengenal dan menghargai para pahlawannya, banggakah mereka dengan bahasa nasionalnya, fasihkah mereka menyimak dasar landasan hidup negara. Berapa banyak orang yang segera turun tangan membantu saat terjadi musibah di tengah masyarakat. Bukankah kita sering kali mengambil jarak, bahkan memikirkan keselamatan diri sendiri saat menyaksikan keterpurukan, konflik, dan sikap merendahkan bangsa sendiri? Sebagai warga bangsa, apakah kita senantiasa memikirkan memberi kontribusi bagi bangsa dalam menjalankan profesi kita masing-masing? Ataukah sekedar mengejar kenyamanan dan kesejahteraan pribadi? Permasalahan lain menyangkut literasi bangsa yang begitu rendah. Data UNESCO menyebutkan minat baca di Indonesia berada pada nilai 0,001, yang dibaca dari seribu orang, hanya ada satu orang yang benar-benar memiliki minat baca.

Gambaran kondisi di atas tidak semata-mata terjadi karena perubahan yang terjadi di tingkat lokal, namun juga merupakan dampak yang muncul dari fobia sains dan teknologi, yang tidak memperhatikan kemaslahatan manusia akan sangat besar pengaruhnya terhadap krisis

kemanusiaan global. Globalisasi dan keterbukaan arus informasi membawa imbas ke arah hal-hal yang negatif yang berpotensi untuk menggerus nilai-nilai lokal. Tekanan industri teknokapitalis berdampak dua wajah. Di satu sisi bangsa beradab diisyaratkan memahami beragam etika, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia. Kondisi ini akan melahirkan masyarakat sipil kritis serta produktif, daya hidup tangguh dan panjang, bisnis industri kreatif dengan kompetisi sehat (Nugroho: 2013). Seyogyanya sains dan teknologi yang melahirkan nilai-nilai kontemporer harus diimbangi dengan landasan nilai dan moral. Manusia tidak saja dituntut untuk menjadi intelektual yang rasional, tetapi ia juga dituntut untuk memiliki watak, kepribadian dan karakter yang baik, sehingga ia tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi ummat manusia.

Dalam kerangka ini proses pembangunan karakter bangsa dalam wacana apapun tidak harus bersifat linear dan singular yang cenderung membawa masyarakat ke satu entitas plolitik yang bersifat tunggal dan seragam. Sebaliknya, Ia menyediakan ruang untuk diskusi dan dialog yang terus menerus guna memperkaya dan mematangkan konsepsi dan perasaan kebangsaan itu. Kita memang tidak bisa menghindari globalisasi. Itu sebabnya kita perlu berpikir dan memanfaatkan imbas globalisasi kearah hal-hal yang positif. Bila kita terus mengembangkan rasa, cinta, hormat, memiliki, semangat ingin memajukan bangsa, dan niat untuk menjaga martabat bangsa dan negaranya, globalisasi

tentu akan terasa sebagai peluang untuk menunjukkan kebanggaan kita kepada bangsa, memamerkan keluhuran nilai dan budaya yang ada kepada dunia internasional. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menegakkan identitas budaya bangsa. Ingat bahwa budaya tidak identik dengan produk seni dan gaya hidup belaka, namun sebagai mana diungkapkan oleh Pemimpin India, Jawaharlal Nehru, “*culture is the widening of the mind and of the spirit.*”

Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa dan lambang negara dan lagu kebangsaan. Pada bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Kemudian Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Selanjutnya Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan di Pasal 36B diatur tentang Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Keempat Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan negara dalam hal penentuan secara resmi penggunaan simbol dan identitas bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (lihat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009).

Bangun kedua yang tidak terlihat tetapi menjadi landasan hidup bernegara adalah visi atau wawasan kebangsaan sebagaimana dihayati oleh warganya. Visi itulah yang menggerakkan setiap warga negara membangun ruang bersama. Berkaitan visi kebangsaan yang inklusif dari para

pendiri republik, penduduk yang beraneka ragam dapat hidup berdampingan dalam sebuah wilayah (ruang bersama) yang disebut Indonesia. Sejumlah teori sosial telah menunjukkan bahwa kebersamaan dalam komunitas yang membentuk satu negara bangsa tidak terjadi begitu saja. Selain sebagai “aksidental dalam sejarah” - dalam kasus Indonesia melalui pengalaman kolonial, Negara Bangsa membangun identitas bersama melalui berbagai proses. Simbol-simbol kenegaraan, ideologi negara adanya bahasa dan media komunikasi yang menyatukan, adalah beberapa bagian dari upaya “membayangkan” - dan dengan demikian meneguhkan komitmen sebagai suatu bangsa (Budianta: 2011).

Kebangsaan Indonesia lahir dari rasa senasib sepenanggungan yang berkembang menjadi keinginan untuk hidup bersama (*le desire d’etre ensemble*) sebagai suatu bangsa. Penderitaan panjang sebagai akibat kondisi hegemoni asing selama ratusan tahun, telah mempersatukan suku-suku bangsa dalam wilayah Nusantara dalam kehendak bersama untuk merdeka untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya persatuan menjadi motor penggerak untuk dengan segera memadukan seluruh potensi membangun kebangsaan menjadi bangsa yang merdeka. Dengan kata lain konsepsi kebangsaan Indonesia tidak hanya lahir dari solidaritas atas dasar asal-usul, suku bangsa, agama, bahasa geografi, tetapi juga pengalaman sejarah dalam persamaan nasib, nasib bangsa terjajah. Karakteristik yang cenderung sering kita

asosiasikan dengan budaya politik dan praktik sosial Belanda di metropolis Eropa—toleransi beragama, berwawasan luas, bentuk awal dari kebebasan berpikir, “kebersamaan” atau demokrasi “kolegial”, pragmatis atau perdagangan bebas—tidak mendasari perilaku Belanda di tanah jajahan Indonesia (Gouda: 2007).

Jangan sampai memori sejarah orang Indonesia terjebak dalam tarik-menarik benang kusut antara mengingat dan melupakan, seolah terperjara dalam, menurut istilah Pierre Nora, ”dialektika antara kenangan (*souvenir*) dan amnesia (*amne'sia*). Interaksi antara kenangan dan amnesia semacam ini muncul dari sebab-sebab yang disengaja maupun tak disengaja, karena pelupaan sama vitalnya dengan penganangan bagi kesehatan sosial sebuah masyarakat, dan kita harus mengetahui “saat yang tepat untuk melupakan maupun saat yang tepat untuk mengingat”. Dalam definisi klasiknya tentang “esensi” bangsa Ernest Renan menekankan pentingnya seluruh warga negara menyepakati “cakupan hal” yang secara kolektif mesti mereka lupakan. Setiap konsensus tentang aspek-aspek masa lalu yang mesti diingat—karena aspek-aspek itu menyuburkan rasa identitas kolektif atau integrasi nasional—nyaris secara otomatis menunjukkan kesepakatan diam-diam tentang apa yang seharusnya dilupakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip dan Pengembangan Literasi Masyarakat

Tingkat literasi menjadi tolok ukur kemajuan bangsa, semakin tinggi tingkat

literasi semakin maju bangsa tersebut. Seseorang atau institusi dalam aktivitasnya serta interaksinya dengan pihak lain senantiasa menciptakan berkas atau rekaman entah itu dalam media kertas atau media lainnya. Rekaman yang dihasilkan dalam relasi sosial ini berisi tentang jati diri seseorang, organisasi, peristiwa maupun fenomena tertentu. Dari rekaman inilah nantinya apabila itu mempunyai nilai yang berkelanjutan (*continuing value*) akan menjadi arsip. Keberadaan suatu institusi yang menyimpan dokumen negara atau arsip dituntut untuk menyediakan khasanah yang dimilikinya sebagai penyimpan memori kolektif disamping tentunya juga untuk memenuhi kebutuhan publik. Pada prinsipnya, arsip yang telah diterima, dan di simpan di lembaga kearsipan, setelah melalui proses akuisisi (penyerahan), kemudian arsip diidentifikasi, dan dipelihara untuk kepentingan bersama.

Berbicara tentang arsip, berarti berbicara tentang dimensi waktu yang lalu. Mengumpulkan materi arsip berarti menghimpun bahan-bahan yang mengandung informasi tentang keadaan dan perbuatan atau kejadian di masa lampau. Apabila kegiatan tersebut diletakkan dalam konteks kebangsaan, berarti aktivitas kearsipan bergerak untuk merangkai jejak perjalanan sebuah bangsa. Suatu aktivitas atau kejadian tidak akan terulang kembali tetapi jejak-jejaknya berupa informasi atau mungkin juga sarana fisik akan tetap bertahan untuk waktu yang relatif panjang. Suatu realitas, baik yang berupa keadaan maupun kejadian akan turut bergeser

bersamaan dengan berjalannya waktu. Keadaan biasanya akan terasa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, sedang kejadian hanya akan terjadi sekali, selanjutnya disusul oleh kejadian yang lain. Masa lampau itu sebenarnya sudah lewat, tidak ada lagi di hadapan kita. Begitu pula kenyataan-kenyataan masa lampau yang pernah aktual pada waktunya akan disusul oleh kenyataan baru yang lebih aktual lagi. Begitulah proses ini nakan berjalan terus tanpa ada henti-hentinya. Karena proses seperti itu menjadi suatu yang alami, maka persoalannya adalah bagaimana kenyataan yang lampau yang sudah lenyap itu bisa sampai kepada kita di masa kini dan juga sebagai warisan di waktu kemudian. Dalam kaitannya dengan arsip, maka dapat dikatakan bahwa jejak yang dapat bertahan lama, dan dapat dikatakan informasinya tidak berubah ialah selain benda-benda yang secara fisik keras tentunya juga jejak tertulis. Dalam hal ini, peranan arsip sebagai catatan sejaman, sebagai suatu “*recorded memory*” menjadi amat dibutuhkan dan berperan besar dalam suatu pembuktian historis, disamping itu tentunya juga sebagai sumber pengetahuan (*knowledge management*).

Sejak manusia mengenal tulisan maka ada usaha untuk merekam kenyataan-kenyataan aktual yang dihadapinya dalam bentuk tulisan-tulisan, yang lazim disebut dokumen. Dari dokumen-dokumen kita dapat memperoleh informasi tentang kenyataan-kenyataan dan permasalahan yang pernah ada di masa lampau, dan mungkin juga tidak tertutup kemungkinan

cara pemecahannya. Karena banyak jenisnya maka diantara bahan-bahan dokumenter yang banyak digunakan adalah: otobiografi, surat-surat pribadi, termasuk catatan harian, memoir, surat kabar, cerita roman, cerita rakyat dan dokumen pemerintah atau arsip.

Di negara kita pada umumnya orang perorangan kurang memberikan perhatian-pada bahan-bahan dokumenter, baik dalam tahap penciptaannya, apabila ia menjadi pelaku atau saksi mata dari suatu kejadian atau peristiwa, maupun memelihara atau memiliki dokumennya. Oleh karenanya, kita belum bisa berharap banyak adanya koleksi bahan dokumenter perorangan. Perkembangan terakhir menunjukkan banyak tokoh atau orang terkemuka menorehkan pengalamannya melalui penyusunan biografi atau memoar yang memuat pengalaman atau kisah pribadinya atau apa yang diketahuinya mengenai peristiwa di masa lalu.

Bahan dokumenter yang relatif lengkap, tersusun dan terpelihara, adalah yang diciptakan oleh organisasi-organisasi, khususnya dilingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, suatu rezim pemerintahan akan membuat, dan meninggalkan catatan-catatan. Berkas catatan yang beraneka ragam tersebut secara umum lazim disebut arsip. Dilihat dari segi kegunaannya, arsip ini tidaklah dimaksudkan untuk bahan penelitian di kemudian hari, melainkan untuk kepentingan praktis internal pemerintahan sendiri. Di dalamnya terekam fakta-fakta,

masalah-masalah dalam pemerintahan dan masyarakat yang perlu ditangani. Dengan pertimbangan bahwa arsip diciptakan dalam suasana sejaman, dekat dengan peristiwa dan kejadiannya sehingga subjektivitasnya berkadar rendah maka arsip merupakan *'first hand knowledge'* yang kredibilitasnya dapat diandalkan. Rekaman-rekaman dalam arsip diciptakan tanpa adanya kepentingan pribadi, kebodohan dan prasangka meskipun subjektivitas pribadi penciptanya tetap ada. Sebagai alat pengambil keputusan, dan akuntabilitas pada umumnya diciptakan dengan ketelitian yang sungguh-sungguh, karena kesalahan, dan pemalsuan akan merugikan, dan menurunkan wibawa pemerintah sendiri sekaligus mengandung resiko baginya.

Arthur Marvick dalam bukunya *The Nature of History* (1970) membagi derajat sumber sejarah yang disebut sebagai *accepted hierarchy* atau berdasarkan hierarki yang diterima, yaitu sumber tertulis yang mencakup *contemporary letters, informers report, disposition, parliamentary and press report, social inquiries, diaries, autobiography*. Semua sumber tertulis yang disebutkan di atas bukannya tidak memiliki kelemahan. Laporan seorang Duta Besar, misalnya dapat dipertanyakan karena yang dikirimkan ke negaranya mungkin laporan yang ingin didengar oleh pemerintahnya. Demikian juga laporan administrator pejabat kolonial masa silam, seringkali kering, dan tidak relevan.

Pemberitaan di surat kabar maupun media elektronik juga perlu dicermati secara kritis. Dalam hal ini, tentu dapat diketahui

pemilik atau orientasi politik, ideologi pemimpin redaksi surat kabar atau stasiun televisi itu. Lebih jauh lagi, bagaimana melacak kebenaran laporan seorang wartawan yang tidak bernama (anonim) atau sekedar mencantumkan inisialnya? Sebuah berita di surat kabar kadang-kadang bukan saja tidak akurat, bahkan dapat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sementara itu, laporan langsung dari manca negara oleh seorang reporter, bisa saja ditulis dari tempat tidur di kamar hotelnya. Akan halnya membaca internet dan media sosial, seseorang tidak dapat melakukan konfirmasi dan verifikasi. Begitu juga halnya dengan otobiografi yang tercetak (*printed authobiographies*), bisa memiliki subjektivitas. Spontanitas di dalam biografi terasa kurang, karena naskah itu sepenuhnya terkontrol. Bagian-bagian yang kurang enak diketahui publik, seringkali disembunyikan. Penerbitan semacam ini lazim dilakukan dengan komunikasi satu arah (*one way communication*).

Arsip yang masih berada di lembaga pencipta biasanya masih dianggap memiliki kegunaan praktis atau bernialai guna primer, lazimnya disebut arsip dinamis yang menurut undang-undang dapat dikecualikan sebagai informasi yang tidak bisa diakses oleh publik. Adapun arsip yang sudah dianggap tidak lagi memiliki kegunaan administratif setelah diseleksi, dikumpulkan, dan ditata, kemudian menurut ketentuan yang digariskan bisa terbuka untuk publik karena telah menjadi arsip statis. Wujud dari arsip tersebut bermacam-macam, sesuai dengan kedudukan dan asal-usulnya. Ada

yang berbentuk surat (korespondensi), surat keputusan, produk hukum atau peraturan perundang-undangan, laporan, notulen rapat, putusan pengadilan, kontrak, memorandum, laporan keuangan dan pembukuan, dan naskah tekstual lainnya yang tidak diterbitkan. Mungkin juga terdiri atas dokumen yang diterbitkan dalam rangka aktivitas organisasi, misalnya buku laporan, direktori, rencana strategis jangka panjang, poster atau iklan. Selain arsip tekstual atau kertas dari segi corak ada juga arsip non-kertas atau audio visual yang terdiri atas foto, film, video, *vcd/dvd*, rekaman suara atau kaset. Di luar itu masih ada arsip elektronik atau arsip yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi termasuk foto digital.

Suatu lembaga kearsipan dibentuk dengan harapan agar supaya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bagi pemerintah peranan lembaga kearsipan dapat menunjang pengambilan keputusan dalam melakukan tugasnya di bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu eksistensi lembaga kearsipan dapat memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan dengan menyediakan materi yang dimilikinya untuk sumber penelitian. Banyak kasus di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah pemahaman yang keliru karena kurang kuatnya budaya literasi bangsa bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamankan agar arsip-arsip yang sangat penting harus dijaga keutuhan, keamanan dan

keselamatannya. Arsip sebagai dokumen negara mendapatkan perlakuan khusus dalam hal perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan mulai dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase dan terorisme. Perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arsip digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Skenario Kearsipan bagi Pemajuan Kebudayaan

Sebagai sebuah pemikiran yang menggunakan “impuls kearsipan” menjadi titik utama keberangkatan, kami menimbang bagaimana arsip dipelihara dan digunakan di dalam sistem sosial ini. Dokumentasi arsip dibutuhkan guna membuat identitas bangsa terbaca, menciptakan otoritas mengenai apa itu identitas bangsa dan wawasan kebangsaan, mengembangkan suatu pemahaman sejarah dalam konteks Indonesia yang menempatkan identitas nasional dalam perangkat yang jelas, serta menjadikan fungsinya masuk akal dalam masyarakat modern. Segala arsip apapun, terdapat cara tak terhingga banyaknya terkait bagaimana dokumen dapat

menggulirkan teori-teori, menemukan hubungan antara kondisi yang berbeda serta menggarisbawahi momen-momen penting dalam sejarah.

Sudah menjadi suatu keniscayaan masa lalu kita yang tak pasti, serta masa depan yang tak terprediksi yang diciptakan oleh kontingensi membuat materi arsip menjadi sangat menarik bagi kita sebagai sumber investigasi dan ekspresi diri. Materi kearsipan mempertegas klaim terhadap ingatan dan oleh karenanya merupakan “sebentuk representasi taksonomi, klasifikasi, dan anotasi informasi dan pengetahuan yang dapat pula dipahami sebagai bentuk historis yang mewakili jamannya sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu; yang dalam alat-alat metodologis tidak dipersiapkan sebagai sebuah kondisi bagi validitas atas penilaian, melainkan sebuah kondisi realitas atas *statement* (Luhmann: 2003).

Sebagai salah satu asset bangsa, materi arsip mengindikasikan kebutuhan akan preservasi testimoni kebangsaan dalam lembaga kearsipan nasional. Seperti Negara Kanada satu-satunya yang telah mengembangkan di tingkat nasional suatu pendekatan *arsip total*,”dimana hampir semua lembaga arsip publik di negeri tersebut—baik ditingkat nasional, provinsi, teritori, kotamadya, universitas dan regional—sebagai bagian dari mandat mereka, mengambil, dalam satu lembaga arsip suatu arsip total yang terdiri atas berbagai bagian yang kira-kira setara berupa rekaman publik, pemerintah atau lembaga sponsor, serta rekaman-rekaman sektor

swasta yang terkait dan menyertakan ke dalam arsip mereka rekaman total dari setiap medium perekaman (termasuk film, televisi, lukisan, dan rekaman suara, yang di negara lain terbagi di antara beberapa penyimpanan lain. Penggabungan antara yang publik dan swasta mencerminkan visi arsip yang lebih luas, yang disahkan dan mencerminkan masyarakat luas, serta pengalaman kesejarahan manusia secara total, alih-alih terbatas pada pandangan sang pengarsip semata-mata sebagai penjaga rekaman resmi Negara (Cook: 2005).

Pendekatan inklusif ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan para pendahulu imperialis terhadap penggunaan arsip-arsip yang ditinggalkan di Indonesia, namun strukturnya masih melekat hingga kini. Pada pertengahan 1800-an Kementerian Tanah Jajahan Belanda menugaskan fotografer resmi untuk mendokumentasikan monumen dan artefak di Jawa yang seakan-akan dilakukan untuk mendukung riset arkeologis pemerintah Belanda. Penjajah menggunakan kamera sebagai “alat propaganda nilai-nilai kolonial yang vital dan guna menangkap praktik-praktik kolonial secara tercetak di Nusantara (sekarang Indonesia)” dalam rangka membangun kekaisaran berbasis pengetahuan kearsipan dan takterpisahkan dari rezim keamanan nasional. Sepanjang abad ke-19, permainan utama ekspansi imperial merupakan permainan kepemilikan dominasi spasial, dimana ada pihak dengan kapasitas lebih besar mengontrol arus informasi melalui arsip. Fenomena lain dikemukakan oleh Okwui Enwezor

(Enwezor: 2008), yang memaparkan penggunaan logistik yang diterapkan penguasa kolonial untuk memperoleh kontrol dokumenter melalui penggunaan arsip. Okwui mengungkapkan “pemerintah imperial Inggris berperan penting dalam penemuan produksi kertas, pelbagai dokumen, dan gambar-gambar yang kemudian melahirkan dokumen-dokumen lainnya, sejalan dengan sistem yang mengorganisir mereka berikut seperangkat aturan pendistribusian kontennya. Arsip fotografi *online* sebagai ingatan orang Belanda (*Het Geheugen van Nederland*) yang mengandung isi yang didapat dari 100 institusi dan mengilustrasikan bagaimana misi-misi fotografis ini membantu bagi ekspansi politik dan ekonomi. Disini ribuan Citra Hindia Belanda tergambar dalam *landskap*, pedesaan, manusia, upacara-upacara, monumen, semuanya diabadikan dalam upaya menegaskan kepemilikan dan kekuasaan.

Hal yang lebih luas dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia virtual, kita dapat kehilangan kontrol atas identitas kita (lewat sosial media) saat begitu banyak sumber, baik dikenal maupun tidak, memposting beragam opini, foto-foto serta komentar terkait dengan beragam aktivitas dan karakter berbagai situs di seluruh dunia, baik yang *mainstream* maupun yang liar. Populasi Indonesia yang terdiri dari 250 juta orang merupakan salah satu pengguna *social media* paling kompulsif di seluruh dunia, dan berdasarkan artikel *Financial Times*, negara kita merupakan pasar Facebook terbesar ketiga

di dunia dan pasar *Twitter* terbesar kelima. Akumulasi detail dan data setiap individu dan aktivitas mereka yang mencampuradukkan kontrol atas citra dan identitas serupa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap penggunaan arsip. Materi arsip dapat diwajibkan dan digunakan melalui banyak cara. Sifat tak terbatas untuk memproduksi, menduplikasi dan pencitraan baik bergerak maupun diam, yang diabadikan melalui kamera berbasis film negatif maupun kamera digital pada wilayah reproduksi mekanis atau distribusi digital atau beberapa proyeksi, kemudian menjadi citra kearsipan (*archival image*) yang sesungguhnya (Strassler: 2010). Suatu yang perlu dipahami adalah bahwa peranan informasi telah mengalami perubahan hakiki, sebagaimana juga terjadi dalam perkembangan masyarakat (Nicholas: 1996). Seiring dengan berjalannya waktu. Citra-citra fotografis menjelma objek yang begitu mengagumkan dan kemudian diappropriasi bagi banyak tujuan institusional, industrial, serta kultural—bisa jadi itu propaganda pemerintah, iklan, *fashion*, *entertainment*, komemorasi pribadi, hingga seni. Penggunaannya membuat instrument fotografi dan film sebagai instrumen penting bagi modernitas kearsipan.

Krisna Murti mencatat *statement* mengenai karyanya: “Digitalisasi melahirkan dunia arsip di jejaring elektronik, ruang virtual. Setiap orang dalam wacana ini otomatis menjadi reporter, pemantau (*surveillance*) dan pengarsip bagi dirinya atau tubuh liyan, atau peristiwa

disekelilingnya (Cocca: 2012). Batas antara artefak asli atau yang bukan menjadi rancu. Soal *authorship*: siapa meng-*copy* siapa atau apa menjadi *absurd*.

Pengklaiman kuasa visual juga dapat ditemukan dalam lukisan-lukisan *mooi indie* yang menangkap kontestasi sengit dalam visi maupun versi romantik, eksotis negeri ini. Objek seni rupa Indonesia seringkali digunakan untuk menegaskan klaim politis - baik dalam lukisan Raden Saleh yang diciptakan untuk melawan otoritas pemerintahan kolonial Belanda, di dalam lukisan-lukisan Sudjojono yang pro-komunis, atau pada eksplorasi karya FX Harsono terkait identitas etnis Tionghoa yang ditekan di bawah kebijakan Orde Baru. Semua itu memperselihkan kebenaran bukti sejarah dan mempresentasikan scenario alternatif dalam rangka mendapatkan pengakuan atas kekuasaan imperial maupun kediktatoran. Pernyataan Niklas Luhmann bahwa “kontingensi berlaku manakala identitas *apa* yang sedang diobservasi menjadi tergantung *siapa* yang mengobservasi” menyuarakan sifat komunikatif bawaan banyak objek serta kemampuannya untuk memuat pesan yang berbeda-beda, tergantung waktu dan khalayaknya. Sekalipun pemaknaan atas objek ini ditentukan oleh pengalaman lampau yang telah dilalui manusia pemaknaan yang mengejawantah berperan aktif bagi individu yang mengalami. Objek kemudian menjelma aktor di dalam cerita, bukan sekedar refleksi tindakan, dan berperan menciptakan perubahan yang kita sebut sebagai proses sejarah. Contoh lain

kita melihat kekuatan aktif objek-objek kearsipan pada karya instalasi Entang Wiharso berjudul *Borderless: Floating World* (2012) yang menyajikan batasan geologis dan lanskap sebagai seting panggung narasi sejarah bertemakan cinta lintas - budaya serta kompromi, serta memeriksa bagaimana stereotype eksternal dan intoleransi terungkap dalam lingkup hubungan pribadi. Terdapat sosok-sosok yang terbalut pakaian dan sepatu milik anak-anak Entang serta pohon lompong hias dan pisang kipas ikonik sebagai salah satu ragam tanaman di tamannya. Sisa-sisa kearsipan kehidupannya sehari-hari menyingkap makna personal dan teleologis sebagai objek-ingatan yang diaktivasi.

Menurut *Archives Society of Alberta*, “catatan pengarsipan bersifat unik, salah satu jenis dokumen yang diciptakan oleh orang-orang atau organisasi ketika mereka melakukan aktivitas keseharian mereka dan dipreservasi bagi referensi yang berkelanjutan. Catatan-catatan ini termasuk korespondensi, notulensi rapat, berbagai kontrak, catatan keuangan, diari, fotografi, kaset video, *file* elektronik di komputer, *email*, dan informasi dalam beragam variasi format. Semua materi dokumenter itu membutuhkan legitimasi. Arsip mendapatkan kualitas kebenaran, fungsi pembuktian, serta kekuatan penafsiran melalui serangkaian desain yang menyatukan struktur dan fungsi.

KESIMPULAN

Kesadaran akan pentingnya memori kolektif perlu diperkenalkan pada seluruh

lapisan masyarakat, karena hanya merekalah yang mempunyai kapasitas untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dalam menjalani hidupnya. Arsip yang berisikan catatan sejarah perjalanan komunitas juga dapat membangkitkan emosi dan eksistensi bersama (Cribb: 2007). Segenap warga harus berkeyakinan bahwa apa yang menjadi identitas budaya mereka itu sebagai bentuk warisan yang memperkaya dirinya, sesuatu yang membedakan dirinya dengan bangsa lain menginspirasi apa yang akan mereka perbuat untuk hari esok. Terlebih dalam kondisi di negara kita dengan keragaman budayanya, itu semua sangat penting bagi individu warga, sebagai sesuatu yang dapat membantu diri kita dalam menempatkan diri di tengah masyarakat dunia. Kekayaan budaya sebagai kekuatan dan kepercayaan diri akan memberikan kekuatan serta mempunyai panduan dalam membentuk martabat bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, arsip telah berfungsi sebagai pengawal warisan dokumentasi umat manusia. Baik bagi individu maupun bagi masyarakat, memori sebagai bagian integral dari eksistensi suatu bangsa. Memori kolektif ini sebagai suatu yang vital untuk dilestarikan sebagai penanda identitas budaya, untuk merangkai masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Arsip menyediakan bukti, informasi dan testimoni yang memungkinkan warga negara mengetahui berbagai kejadian dalam perjalanan sejarahnya dan mengembangkan literasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tanpa arsip kita tidak akan

pernah tahu eksistensi kita. Tanpa catatan kita bisa kehilangan memori, dengan begitu kita tidak mempunyai identitas, dengan demikian kita akan kehilangan kesadaran akan kekinian kita yang selanjutnya tentu akan sulit untuk merencanakan masa depan. Dan memori tentu saja merupakan asset yang sangat berharga dan sebagai sumber daya di masa depan yang dipercayakan kepada kita semua di masa kini. Institusi yang menyimpan data-data sejarah Indonesia semata, melainkan menjadi tempat dimana informasi tentang sejarah dunia dapat ditemukan, dapat ditransformasikan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia dalam sejarah dunia sebagai sebuah kesetaraan.

Konsensus atas rasa identitas kolektif selalu rentan dan bersifat sementara, karena proses mengingat dan melupakan selalu berubah. Kita bisa memandang bahwa narasi-narasi sejarah membentuk institusi resmi memori bangsa, tetapi dengan ruangan yang sayangnya sangat terbatas. Suatu saat, tatkala narasi sejarah tertentu tak lagi berkilau dan kehilangan daya tarik imajinatifnya, narasi itu harus dikeluarkan dari “istana memori” untuk memberi tempat bagi cerita baru yang lebih berkilau.

Kronik-kronik sejarah yang terkandung di dalam arsip merupakan elemen dasar dalam pembentukan identitas kebangsaan: kronik-kronik itu berfungsi sebagai “meta narasi” yang menjaga dan menguduskan asal-usul bersama sebuah bangsa, sekalipun kronik-kronik itu mempercantik fakta fakta sejarah

“sebenarnya” dengan beragam mitos dan realitas semu.

Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi tindakan adaptasi individual dan kolektif, yaitu: “...*common ideas about what is believable, desirable, feasible, and acceptable.*” Gagasan bersama tentang apa yang diyakini, diinginkan, dimungkinkan, dan dapat diterima itu menentukan interpretasi tentang informasi yang diperoleh serta langkah-langkah yang ditempuh dalam beradaptasi pada perubahan lingkungan.

Melihat permasalahan di atas, mengajarkan kepada kita betapa penting arti pengelolaan memori yang terekam dalam dokumen yang tidak lain adalah arsip. Sebagai implementasinya perlu diterapkan penataan dan pengelolaan dokumen secara integral dan bertanggungjawab, sejak dari kegiatan penciptaan hingga tahap akhir proses lingkaran hidup dokumen di setiap lembaga dan korporasi dalam rangka tertib arsip. Kita semua harus sadar bahwa data atau informasi yang terekam dalam bentuk arsip mempunyai nilai yang strategis dan ekonomis dalam era informasi ini. Pengelolaan dokumen pada dasarnya bukan hanya merupakan kebutuhan di masa sekarang tetapi juga sebagai tuntutan generasi yang akan datang. Ia dibutuhkan untuk memproduksi, mengembangkan, mentransmisikan “kebudayaan Indonesia” melalui artefak material dalam hal ini tulisan sebagai tuntutan kebutuhan ilmu dan modernisasi. Untuk itu kita harus menanganinya secara sungguh-sungguh bila kita masih mau disebut sebagai bangsa yang beradab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis perlu memberikan penghargaan kepada beberapa pihak. Baik melalui perjumpaan secara langsung maupun melalui ide dan gagasan yang tertuang dalam berbagai media, penulis dapat mengetahui tumbuhnya kesadaran untuk mendokumentasikan kegiatannya. Mereka adalah para profesional, seperti wartawan, sutradara, pengelola galeri dan pekerja seni lainnya, yang senantiasa merasa perlu merawat karya kreasi yang dihasilkannya dan catatan pendukung yang tak lain adalah arsip. Ketekunan ini tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi juga menjadi sumbangan berharga bagi pemajuan budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhitama, Toeti Prahastika. *Tuntutan Transformasi. Media Indonesia*, Jumat, 7 Juni 2013.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1983. *Socio-Cultural Creativity In The Converging and Structuring Process of The Emerging World*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Arsip Nasional RI. 1980. *Arsip dan Sejarah*. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- BASIS*, Nomor 07 -08, Tahun Ke 60, 2017.
- Basuki, Sulistyono. 1995. *Informasi dalam Konteks Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Serta Peranannya Bagi Masyarakat*. Depok: FSUI.
- Cocca, Christine. 2012. *RE. CLAIM: The Continuous Redefinition in Indonesia Art*.
- Cook, Terry. 2005. *Remembering the future: appraisal of record and the role of archives in constructing social memory. Archive, Documentation and institutions of Social Memory: Essay from the Sawyer Seminar, Francis X. Blouin Jr. and William G. Rosenberg eds.* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005).
- Cribb, Robert. 2007. *The Indonesian Revolution: Archives and Emotion*. International Seminar "Archives As Collective Memory of The Nations". Denpasar, 3-4 September 2007.
- Dahana, Radhar Panca. *Kebudayaan Indonesia Gagal*. *Harian Kompas*, 17 Maret 2012.
- Enwezor, Okwui. 2008. *Archive Fever: Use of the Document in Contemporary Art*. New York: International Center of Photography and Steidl Publishers.
- Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas, Praktik Kolonial Hindia Belanda, 1900 – 1942*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Lohanda, Mona. 2011. *Membaca Sumber Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-Forum Jakarta Paris.
- Marsanto P. Khidir. *Konstruksi Identitas Bangsa Dalam Foto*. *Harian Kompas*. Minggu, 25 November 2012.

- Moss, William W. 1986. *Archives, Oral History and Oral Tradition: a RAMP Study*. Paris: UNESCO.
- Nicholas, David. 1996. *Assessing Information Needs: Tools And Techniques*. London: Aslib.
- Nugroho, Garin. "Pantun Menteri Jiran", *Kompas*, Minggu, 28 April 2013.
- Rachman, Arief. *The Importance of Memory of the World in Strengthening the Dignity of the Nation*. International Seminar "Archives As Collective Memory Of The Nations". Denpasar, 3-4 September 2007.
- Redana, BRE. *Tubuh Kita*. *Harian Kompas*. Minggu, 28 April, 2013
- Strassler, Karen. 2010. *Refracted Visions: Popular Potography and National Modernity in Java*. London:
- Sarumpaet, Riris K. Toha. 2011. *Ilmu Pengetahuan Budaya dan Tanggung Jawabnya: Analektika Pemikiran Guru Besar FIB UI*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Thompson, Paul. 2012. *Suara Dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. 2003. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Sumbangan Pemikiran dan Aktualisasinya*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Winarto, Yunita Triwardani, "Climate and Culture: Changes, Lessons, and Challenges". Award Ceremony and Scientific Paper Presentation. Depok, March 4th, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pemajuan Kebudayaan. Lembaran
Negara RI Tahun 2017. Jakarta:
Sekretariat Negara.

Web Page

Feng, Huiling. 2012. *The Value of Archives
in the Modern Identity*. (Online).
(www.uiweb.uidaho.edu)